

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KEDIRI

RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas pelaksana kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika dengan telah disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2024.

Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam malaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai bentuk implementasi dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan normatif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengandung mandatori terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja yang telah disusun Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan secara maksmial mampu mendukung susksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kediri, - - 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri

SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690223 198903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 8
1.3 Maksud dan Tujuan 13
1.4 Sistematika Penulisan 14
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 56
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD 72
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 72
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah 76
3.3 Program dan Kegiatan 79
BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN SKPD 93
BAB V. PENUTUP 96

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas pelaksana kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika dengan telah disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2024.

Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam malaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai bentuk implementasi dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan normatif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengandung mandatori terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja yang telah disusun Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan secara maksmial mampu mendukung susksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kediri, - - 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri

SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690223 198903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 8
1.3 Maksud dan Tujuan 13
1.4 Sistematika Penulisan 14
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 56
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD 72
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 72
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah 76
3.3 Program dan Kegiatan 79
BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN SKPD 93
BAB V. PENUTUP 96

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara pengertiannya, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan penandaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan berdasarkan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD ;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan Pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) bukan

   kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang

   simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.Keterkaitan Rencana Kerja dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Rencana Kerja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, RPJMD, RKA OPD, KUA- PPAS dan RAPBD.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang pada hakikatnya dapat mempermudah setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual Organisasi Perangkat Daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

Di dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan

penyusunan rancangan awal Organisasi Perangkat Daerah, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Selain Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Adapun Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih hasil pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun yaitu: ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-

Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani". Yang dirumuskan secara umum dalam Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Seluruh dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja pemerintah Dearah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu,

maka Rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Rencana kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat daerah, adalah sebagai berikut;

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD 2024;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbngan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang membidangi pembangunan dan penyebarluasan informasi, pengembangan dan pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi merupakan aspek yang menjanjikan fasilitasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat, organisasi termasuk dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik serta mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik elektronik government (E-gov) yang dimaknai sebagai penyelenggara kepemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar mendapatkan hasil yang optimal maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan belanja dinas, prioritas kegiatan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

1.3 Maksud danTujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD). Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah :

1. Memberikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik di tahun 2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor dan sub sektor terkait.
2. Memberikan pilihan-pilihan kebijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
3. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Pada dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran termasuk total kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan serta kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada dua tahun sebelumnya terdapat data yang menunjukkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan tahun berjalan yaitu tahun 2023 (tahun n-1) menunjukkan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupeten Kediri tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan di tahun 2023 (n-1)nyaitu terdapat 100 % pencapaian rencana kerja dari target Kinerja dan Anggaran RKPD meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 mengacu pada APDB tahun berjalan serta telah disahkan pada waktu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2024. Pada Rencana Kerja tahun 2024 berkaitan dengan program-program kegiatan yang merupakan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022, tahun 2023 dan realisasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dan atau realisasi APBD untuk Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Kediri.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik. Tugas, fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kediri. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik. Sedangkan dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai fungsi yaitu:

a) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
b) penyusunan perencanaan prograrn dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
c) pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
e) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
f) pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
g) pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
h) penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2022 dan tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas, pokok dan fungsinya dengan program di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, yaitu:

1. Melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengoptimalkan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Meningkatkan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Memajukan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Memaksimalkan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2024. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapen Kediri dalam melaksanakan 5 program dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 44 sub yang tertuang dalam APBD sebesar Rp. 30.803.734.610,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah). Realisasi pelaksanaan program tersebut diselesaikan dengan anggaran sebesar Rp. 26.617.246.049,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Sembulan Rupiah) atau 86,41 %. Dalam pelaksanaannya antara target dan realisasi terdapat hasil/keluaran yang tidak terpenuhi, terpenuhi, dan terpenuhi melebihi target, adapun hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Realisasi Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah pada :

   a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada target anggaran

Rp. 149.342.548,00 dengan hasil realisasi masih dibawah target yaitu mencapai 59,08 % dengan realisasi anggaran Rp. 394.181.424,00.

2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi belanja sebesar Rp. 6.891.523.439,00 atau sebesar 88,90 % dari anggaran Rp. 6.403.414.182,00.

b. Program Informasi Dan Komunikasi Publik senilai Rp. 6.347.246.710,00 terealisasi sebesar Rp. 12.270.741.078,00 dengan prosentase realisasi 86,50 %.

c. Program Aplikasi Informatika terealisasi sebesar Rp. 6.475.284.231,00 atau 85,77 % dari target senilai Rp. 3.407.773.982,00.

d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada realisasi mencapai prosentase 90,18 % dengan anggaran realisasi sejumlah Rp. 585.515.877,00 dari besaran target program sebesar Rp. 329.627.900,00.

3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk tahun 2022 tidak ada.

Capaian/Realisasi Program tahun 2022 semua dapat memenuhi target kinerja yang diharapkan dapat dilihat dari setiap program capaian realisasinya adalah diatas 80 % faktor penyebab tercapainya target kinerja adalah :

a. Meningkatkan potensi sumber Daya yang ada ;
b. Mengoptimalkan kualitas Kemampuan Pelaksana Pengelola Keuangan;
c. Melaksanakan Koordinasi yang intensif dalam proses penyelenggaraan program;
d. Melaksnakan mandatori peraturan perundang-undangan yang menjadikan dasar;

e. menentu kebijakan program/kegiatan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ;

f. Menyusun petunjuk pelaksanaan program pada setiap pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022, disebabkan jadwal pencairan PAK APBD tahun 2022 mundur mendekati jadwal pelaksanaan kegiatan membangun metadata statistik sektoral.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022, disebabkan jadwal pencairan PAK APBD tahun 2022 mundur mendekati jadwal pelaksanaan kegiatan membangun metadata statistik sektoral.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.1 berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									

2.16	**Komunikasi dan Informatika**									
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**3,00**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**100%**	**4 dokumen**	**12 dokumen**	**3,00**
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	3,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	3,00
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**20 dokumen**	**20 dokumen**	**20 dokumen**	**20 dokumen**	**100%**	**20 dokumen**	**60 dokumen**	**3,00**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	34 orang/bulan	42 bulan	3,00
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	13 bulan	13 bulan	13 bulan	100%	13 dokumen	39 dokumen	3,00

2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	14 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	3,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	3,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	54 laporan	3,00
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	6 dokumen	3,00
2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**100%**	**2 dokumen**	**6 dokumen**	**3,00**
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	3,00
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	3,00

2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**1 dokumen**	**1 dokumen**					**1 dokumen**	**1,00**
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen	1,00
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 kegiatan	12 kegiatan					12 kegiatan	1,00
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30 dokumen**	**30 dokumen**	**30 dokumen**	**30 dokumen**	**100%**	**30 dokumen**	**90 dokumen**	**3,00**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan yang disediakan	4 paket	4 paket	4 komponen	4 komponen	100%	4 paket	12 paket	3,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 peralatan/perlengkapan	4 peralatan/perlengkapan	100%	4 paket	12 paket	3,00
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	4 peralatan	4 peralatan	4 peralatan	100%	4 paket	12 paket	3,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	4 peralatan/perlengkapan	4 peralatan/perlengkapan	4 peralatan/perlengkapan	100%	4 paket	12 paket	3,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	4 paket	4 paket	4 barang cetakan/penggandaan	4 barang cetakan/penggandaan	100%	4 paket	12 paket	3,00

		disediakan								
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	3,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	3,00
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**								
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan								
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**36 bulan**	**3,00**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	3,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	3,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	13 laporan					13 laporan	13 laporan	1,00

		Kantor yang disediakan								
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**30 unit**	**30 unit**	**30 unit**	**30 unit**	**100%**	**30 unit**	**90 unit**	**3,00**
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	48 unit	3,00
2.16.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara								
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	48 unit	3,00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi								
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi								
2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**3,00**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Jumlah informasi yang terkelola**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**100%**	**12 dokumen**	**36 dokumen**	**3,00**

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	3,00
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	3,00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	3,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	18 dokumen	3,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	18 dokumen	3,00
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	62 layanan	62 layanan	62 layanan	62 layanan	100%	62 layanan	186 layanan	3,00
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	1,00
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkta Kapasitasnya	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100%	80 orang	240 orang	3,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Jumlah peserta Bakoinmas		80 orang	80 orang	80 orang	100%	80 orang	240 orang	

	Komunitas									
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	5 unit					1 unit	1 unit	0,20
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**3,00**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang terkelola**			**150 domain/sub domain**	**100 domain/sub domain**	**67%**	**40 domain/sub domain**	**140 domain/sub domain**	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terdaftar			150 domain/sub domain		0%			
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terpelihara			100 domain/sub domain	100 domain/sub domain	100%	40 domain/sub domain	140 domain/sub domain	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola**	**1020 sistem informasi**	**170 sistem informasi**	**170 sistem informasi**	**170 sistem informasi**	**100%**	**170 sistem informasi**	**340 sistem informasi**	**0,33**
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	6 kegiatan					1 dokumen	1 kegiatan	0,17
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pasat Data Pemerintahan Daerah	Uptime Layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten	570%	95%	95%	95%	100%	100%	3 unit	0,51

		Kediri								
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah		3 kegiatan	125 kegiatan	134 kegiatan	107%	125 kegiatan	262 kegiatan	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	3,00
2.16.03.2.02.07	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri								
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	3,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	18 paket	3,00
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	2 dokumen	0 paket	1 paket	1 paket	100%	1 dokumen	2 dokumen	1,00
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 dokumen	2 kegiatan	2,00
2.20	**URUSAN**									

	PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**		**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah**	**1 paket data statistik sektoral**	**1 paket data statistik sektoral**	**1 paket data statistik sektoral**	**1 paket data statistik sektoral**	**100%**	**1 paket data statistik sektoral**	**3 paket data statistik sektoral**	**3,00**
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	3,00
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	57 orang					57 orang	57 orang	1,00
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun								
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 unit					2 unit	2 unit	1,00
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**3,00**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang**	**1 paket**	**1 paket**	**1 paket**	**1 paket**	**100%**	**1 paket**	**3 paket**	**3,00**

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**aman**								
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan								
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	3,00
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi								

Tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas sebagai perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik melaksanakan program/kegiatan menuju capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja berdasarkan NSPK yang merupakan ketentun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah, dan SPM yang sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 tahun 2011 tentang petunjuk teknis standard pelayanan minimal sesuai standar nasional, perlu didukung dengan upaya pencapaian target indikator kinerja umata Dinas Komunikasi dan Informatika. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisa target yang telah dicapai pada masing-masing indikator sasaran dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Berdasarkan RPJMD 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengemban Misi 2 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, yang meliputi :

1. Tujuan adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Sasaran adalah Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Strategis adalah Digitalisasi birokrasi, informasi dan layanan publik.
4. Arah Kebijakan adalah :
    a. Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan Publik;
    b. Pengembangan e-government;

c. Penerapan Tata Naskah Dinas Elektroni;

d. Pengembangan Smart- Pertanian melalui program Desa Inovasi Tani Organik (DITO);

e. Pengembangan ekonomi digital (e-commerce);

f. Menyediakan pelayanan cerdas menggunakan teknologi informasi berbasis Big Data, Artificial Intelligence, Robotics, Cloud Computing sehingga masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dari rumah;

g. Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data;

h. Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika;

i. Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya;

j. Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio;

k. Pengembangan komunikasi tematik melalui program NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi);

l. Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas, dan kelompok informasi masyarakat;

m. Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik;

n. Inovasi pelayanan publik jemput bola;

o. Penguatan jejaring komunikasi persandian daerah;

p. Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik;

q. Penyediaan Mall Pelayanan di kecamatan atau desa;

r. Mendorong intensitas komunikasi pemberi pelayanan kepada pengguna layanan untuk selalu melakukan perbaikan layanan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat;

s. Peningkatan komunikasi dan informasi publik NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi) ;

t. Penyediaan mobil siaga.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 diperoleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik yang diturunkan dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yaitu melaksanakan Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan Indikator Tujuan/Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan Indeks SPBE dan Indeks Kategori PPID. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangakat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri

NO	Indokator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks SPBE	-	-	3.88	4,04	4,28	4,52	3,12	2,61	3,25	3,50	Adanya perubahan indikator dalam penilaian dari Kemenpan Reformasi Birokrasi.
2	Indeks Kategori PPID	-	-	E	D	C	C	E(6,6)	E(12)	C	C	Adanya Indikator baru dalam penilaian dari Komisi Informasi

Tabel : 2.2

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembangan Komunikasi dan Informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen – elemen dalam tata kelola komunikasi, yakni sumber berita / informasi, penerima berita / informasi, substansi berita / informasi dan saluran berita / informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen – elemen tersebut, ternyata terdapat beberapa isu sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
   a. Indeks SPBE :

      Sesuai apa yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Kediri, bahwa tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menjalankan Misi 2 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Misi 2 tersebut diturunkan ke dalam program prioritas yaitu Peningkatan Pelayanan Publik dengan memanfaatkan TIK/SPBE.

      Saat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui digitalisasi layanan publik sehinga layanan dapat lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Program digitalisasi pemerintahan merupakan tugas seluruh OPD dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector yang mengampu terkait SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut:

      1. Program Aplikasi Informatika
         a. Kegiatan Pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah
         b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah atau yang dikenal dengan SPBE
      2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

3. Program Statistik Sektoral dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dimana Dinas Komunikasi dan Informatikan bertindak sebagai Walidata yang mempunya tugas mengelola Satu Data Kabupaten Kediri
4. Program Persandian dengan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pengelolaan SPBE dilakukan melalui Program Aplikasi Informatika yang secara umum kegiatannya untuk mengelola sumber daya TIK antara lain:

1. Infrastruktur TIK

   Infrastruktur TIK terdiri atas Fasilitas dan Teknologi TIK seperti Server, Jaringan Internet, Jaringan Intranet, Konektivitas TI baik kabel atau nirkabel, perangkat jaringan dll.
2. Aplikasi TIK

   Aplikasi TIK menjalankan fungsi layanan baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Melalui aplikasi TIK tersebut diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik secara cepat dan mudah dapat diakses oleh masyarakat
3. Tata Kelola TIK

   Tata Kelola TIK diperlukan untuk memastikan SPBE berjalan dengan baik dan benar sehingga diperlukan regulasi atau kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam menjalankan SPBE mulai perencanaan sampai dengan evaluasi sehingga perbaikan SPBE dapat berkelanjutan.
4. SDM TIK

SDM TIK merupakan penyelenggara SPBE sehingga diperlukan kualitas dan kuantitas yang memadai dalam melaksanakan layanan publik berbasis digital.

5. Ekosistem TIK pada Kota/Kabupaten Cerdas

   Kota Cerdas merupakan tempat dimana kebutuhan masyarakatnya dapat terlayani dengan mudah dan cepat. Hal ini sejalan dengan tujuan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kata lain layanan publik berbasis digital merupakan bagian dari ecosystem Kota Cerdas.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tertuang pada RPJMD adalah mengelola SPBE dengan indikator kinerja menggunakan indeks SPBE. Adapun kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Penilaian tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada Indeks SPBE dengan pedoman hasil dari Pemantauan dan Evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB yang menilai tingkat kematangan penerapan SPBE pada IPPD. Tolak ukur hasil pemantauan dan evaluasi SPBE dikatakan dalam kategori semakin matang dalam penerapan SPBE atau pada nilai indek SPBE tingkat tertinggi adalah nilai 5.

Pada indikator tingkat realisasi anggaran pada target 2022 sebesar Rp. 26.355.597.110,00 sedangkan capaian kinerja 2022 pada anggaran Rp. 22.427.677.662,00 atau 86,41 % dalam kategori Baik. Adapun analisa indikator kinerja dengan melihat Indeks SPBE di target 4,04 dengan capaian kinerja 2022 yaitu 2,61 atau prosentase tingkat capaian kinerja mencapai 64,60 % pada kategori Baik. Indeks SPBE Kabupaten Kediri pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 0,51 point yaitu 3,12

menjadi 2,61 karena adanya tambahan beberapa indikator baru pada penilaian Monitoring dan Evaluasi SPBE.

Hasil indek SPBE dengan capaian 2,61 pada kategori baik menimbulkan dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil menerapkan SPBE dengan baik. Meskipun demikian harus ditingkatkan lebih intensif mengingat capaian target akhir RPJMD saat ini masih mencapai 52%.Transformasi digital pada penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan dengan menerapkan SPBE secara tepat sehingga berdampak dengan meningkatnya kecepatan dan kemudahan masyarakat mengakses layanan publik.

b. Indeks Kategori PPID

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Renstra SKPD Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan melaksanakan Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada indikator kinerja berupa Indeks Kategori PPID sebagai target pencapainnya adalah di nilai D. Kualifikasi untuk pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik adalah :

a. Informatif dengan nilai 97-100 dengan kategori A
b. Menuju Informatif dengan nilai 80-86 dengan kategori B
c. Cukup informatif dengan nilai 60-79 dengan kategori C
d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59 dengan kategori D
e. Tidak Informatif dengan nilai <39 dengan kategori E

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada Indikator Kinerja berupa Indeks Kategori PPID terealisasi pada nilai E (12)

atau dalam kategori sangat rendah dari target D (40) sehingga Capaian Kinerja 30,00 %. Kondisi Capaian Kinerja tersebut dikarenakan:

1. Minimnya data informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan keterbukaan informasi publik yang disediakan dan dipublikasikan.
2. Belum adanya klasifikasi informasi publik dan penetapan Daftar Informasi Publik.
3. Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik yang belum update sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya SOP Pengelolaan Permohonan Informasi, SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik.
4. Belum maksimalnya peran aktif PPID.
5. Masih kurangnya koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten Kediri.

Untuk menuju peningkatan kecapatan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik melalui indek SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menghadapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yaitu:

Tantangan Pelayanan Dinas Kominfo :

a. Tuntutan keterbukaan informasi publik dan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana
b. Pesatnya perkembangan TIK dan pemerataan infrastruktur TIK
c. Tuntutan Transformasi digitalisasi pelayanan publik
d. Tuntutan ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*
e. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi sesuai standarisasi BSSN

Peluang Pelayanan Dinas Kominfo :

a. Era keterbukaan yang mendorong kinerja perangkat daerah lebih optimal
b. Reformasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai program prioritas dan isu strategis pemerintah daerah
c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi

Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dengan cara :

a) Menyediakan infrastruktur khususnya kapasitas Bandwidth Internet yang
cukup besar untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet
b) Menyediakan Sumber Daya Manuasia TIK yang mempunyai kompetensi yang memiliki sertifikasi.
c) Melaksanakan pembinaan di tingkat Desa agar mampu menyelenggarakan
layanan publik secara terintegrasi.

Perwujudan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan Statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Kediri yang dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah, antara lain:

1) Jumlah aplikasi e-Government yang berfungsi baik menurun.
Pengembangan aplikasi e-Government dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2019 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, berdasarkan data yang tersedia, pada tahun

2018 terdapat aplikasi sejumlah 99 dengan penjelasan yang menunjukkan 34 aplikasi dengan kondisi baik, sedangkan tahun 2019 dan 2020 terdapat 101 aplikasi dengan kondisi baik sejumlah 100 dan 1 aplikasi yang memerlukan perbaikan, dan pada tahun 2021 ada 107 aplikasi dengan 81 aplikasi dengan kondisi baik namun membutuhkan perbaikan aplikasi sejumlah 26 aplikasi. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan aplikasi yang berfungsi dengan baik, hal tersebut dikarenakan sejumlah aplikasi yang umumnya berupa website SKPD sedang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Pada umumnya beberapa aplikasi tersebut mengalami serangan siber baik virus ataupun malware sehingga harus disuspend dulu untuk dilakukan analisa dan perbaikan.

2) Belum optimalnya pelayanan informasi komunikasi publik yang ditandai dengan masih rendahnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun, yaitu nilai kategori "E".

   Kondisi tersebut disebabkan adanya :

   a. Keterbukaan Informasi Publik yang belum maksimal
   b. Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal
   c. Belum adanya ketersediaan data statistic sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dalam bidang di bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan Statistik Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Pada rancangan awal RKPD menunjukkan tingkat kapasitas dalam mengakses layanan publik melalui indek SPBE tedapat target akhir adalah 5 dan dibandingkan dengan hasil capaian kinerja indeks SPBE sebesar 2,61, sedangakan untuk pelayanan informasi

komunikasi publik pada Indeks PPID di target D (40) namun capain kinerja Indeks PPID hanya mencapai nilai E(12). Untuk menindaklanjuti Hasil Capaian Kinerja pada indikator indeks SPBE dan indeks PPID dilakukan proses perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan dengan tujuan untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dalam kegiatan perencanaan dan penanggaran tahunan pembangunan daerah dan mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang besarannya berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dengan format berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Kediri

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
1	**Komunikasi dan Informatika**										
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	Ds. Doko, Ngasem		**100%**	**13.281.169.300**		Ds. Doko, Ngasem			**13.281.169.300**	
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Ds. Doko, Ngasem	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	4 dokumen	**5.472.020.300**		Ds. Doko, Ngasem	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**5.472.020.300**	
2.16.01 .2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	3 dokumen	-		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	4 dokumen	-	
2.16.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 laporan	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	-	
2.16.01	Koordinasi dan	Ds. Doko,	Jumlah Laporan	**60**	-		Ds.	Jumlah Laporan	1 laporan	-	

.2.01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ngasem	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**dokumen**			Doko, Ngasem	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	32 Orang/Bulan	**5.011.819.300**		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**60 dokumen**	**5.011.819.300**	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 dokumen	3.849.319.300		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	3.849.319.300	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	1.033.500.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	1.033.500.000	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 laporan	129.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	129.000.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	18 laporan	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	-	

			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	-	
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran	**14 laporan**	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	-	
2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	2 dokumen	**108.000.000**		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**14 laporan**	**108.000.000**	
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	12 laporan	102.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	2 dokumen	102.000.000	
2.16.01.2.03.0	Penatausahaan Barang Milik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Penatausahaan	**1 dokumen**	6.000.000		Ds. Doko,	Jumlah Laporan Penatausahaan	12 laporan	6.000.000	

6	Daerah pada SKPD		Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD				Ngasem	Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD			
2.16.01 .2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**	1 dokumen	-		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**1 dokumen**	-	
2.16.01 .2.05.0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**44 dokumen**	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	-	
2.16.01 .2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah**	4 paket	**156.904.300**		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah**	**44 dokumen**	**156.904.300**	
2.16.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerang an bangunan yang disediakan	4 paket	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan yang disediakan	4 paket	-	
2.16.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	73.480.100		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	73.480.100	
2.16.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	3.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	3.000.000	
2.16.01 .2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket bahan logistik	4 paket	16.734.500		Ds. Doko,	Jumlah paket bahan logistik	4 paket	16.734.500	

4			kantor yang disediakan				Ngasem	kantor yang disediakan			
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 dokumen	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	-	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 laporan	8.331.700		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	8.331.700	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**40 unit**	55.358.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	55.358.000	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	21 unit	-		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**40 unit**	-	
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	19 unit	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	21 unit	-	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**36 laporan**	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	-	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah laporan penyediaan**	12 laporan	**137.296.700**		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**36 laporan**	**137.296.700**	

	Daerah		**jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**					**urusan pemerintahan daerah**			
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	7.296.700		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	7.296.700	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	**67 unit**	130.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	130.000.000	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 unit	**58.000.000**		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**67 unit**	**58.000.000**	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	58.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	58.000.000	
2.16.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Mebel yang dipelihara	25 unit	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Mebel yang dipelihara	20 unit	-	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ds. Doko, Ngasem	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 unit	-		Ds. Doko, Ngasem	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	-	

2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi	5 unit	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi	1 unit	-	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi	**100%**	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi	5 unit	-	
2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	Ds. Doko, Ngasem	**Cakupan Layanan informasi dan komunikasi publik**	**100%**	**3.456.843.000**		Ds. Doko, Ngasem	**Cakupan Layanan informasi dan komunikasi publik**	**100%**	**3.456.843.000**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Ds. Doko, Ngasem	**Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah kab/kota**	12 dokumen	**3.456.843.000**		Ds. Doko, Ngasem	**Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah kab/kota**	**100%**	**3.456.843.000**	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3 dokumen	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 dokumen	-	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda	12 dokumen	44.496.500		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	3 dokumen	44.496.500	

			Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah			
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen	320.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	320.000.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen	65.500.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen	65.500.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	62 layanan	15.400.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 dokumen	15.400.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 dokumen	2.961.446.500		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Layanan Hubungan Media	62 layanan	2.961.446.500	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 dokumen	50.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5 dokumen	50.000.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkta Kapasitasnya	5 unit	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkta Kapasitasnya	2 dokumen	-	
2.16.02	Penyediaan/Pengada	Ds. Doko,	Jumlah Sarana	**4,52**	-		Ds.	Jumlah Sarana	5 unit	-	

.2.01.13	an Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Ngasem	dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah				Doko, Ngasem	dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	Ds. Doko, Ngasem	**Nilai Indeks SPBE penilaian dari Kemenpan RB**	**2 layanan**	**4.352.306.000**		Ds. Doko, Ngasem	**Nilai Indeks SPBE penilaian dari Kemenpan RB**	**4,52**	**4.352.306.000**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah Layanan SPBE yang terkelola**	3 unit	**4.352.306.000**		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah Layanan SPBE yang terkelola**	**2 layanan**	**4.352.306.000**	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	1 dokumen	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	3 unit	-	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 dokumen	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 dokumen	-	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	2 dokumen	4.123.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	1 dokumen	4.123.000.000	

			Komunikasi Pemerintah Daerah					Komunikasi Pemerintah Daerah			
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)		229.306.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	2 dokumen	229.306.000	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	Ds. Doko, Ngasem		**100%**	**179.141.600**		Ds. Doko, Ngasem			**179.141.600**	
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	Ds. Doko, Ngasem	**Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah**	**4 kegiatan**	**179.141.600**		Ds. Doko, Ngasem	**Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah**	**100%**	**179.141.600**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah**	4 dokumen	**179.141.600**		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah**	**4 kegiatan**	**179.141.600**	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	65 orang	143.651.900		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	143.651.900	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 dokumen	5.539.800		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	65 orang	5.539.800	

2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	2 unit	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	41 dokumen	-	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Infrastruktur Statistik		29.949.900		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 unit	29.949.900	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	Ds. Doko, Ngasem		**100%**	**725.000.000**		Ds. Doko, Ngasem			**725.000.000**	
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	Ds. Doko, Ngasem	**Cakupan keamanan persandian dan TI**	**1 paket**	**725.000.000**		Ds. Doko, Ngasem	**Cakupan keamanan persandian dan TI**	**100%**	**725.000.000**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman**	2 dokumen	**725.000.000**		Ds. Doko, Ngasem	**Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman**	**1 paket**	**725.000.000**	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	3 laporan	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	2 dokumen	-	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan	6 laporan	-		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan	3 laporan	-	

	Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	65 perangkat daerah	725.000.000		Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 laporan	725.000.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		-			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	65 perangkat daerah	-	
JUMLAH					**14185310900**					**14185310900**	

Tabel 2.3

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam pelaksanaannya merupakan pelaksanaan urusan wajib terkait bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Tugas Pokok yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, dengan meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah interoperabilitas sistem informasi.

Program-program pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan program-program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat memberikan akses layanan informasi dan komunikasi untuk kebutuhan publik secara tepat, cepat, efisien dan efektif serta sinergis dengan perkembangan teknologi yang tersedia.

Di tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai sasaran dalam mempercepat dan meningkatkan pelayan publik, hal utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan RKPD Kabupaten Kediri diantaranya pengembangan infrsatruktur TIK dan interoperabilitas aplikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal pelayanan publik. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah pengembangan akses telekomunikasi didaerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.

Dalam pelaksanaa Good Governance, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudahan dan wajar. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas diharapkan bukan lagi dalam artian terbatas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri akan tetapi menjangkau seluruh elemen pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri. Pembangunan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kediri dipengaruhi oleh posisi geografi Kabupaten Kediri yaitu terletak antara 111° 47' 05" sampai dengan 112° 18'20" Bujur Timur dan 7° 36' 12" sampai dengan 8° 0' 32 Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten, yakni :

- Sebelah Barat :Tulungagung dan Nganjuk
- Sebelah Utara : Nganjuk dan Jombang
- Sebelah Timur : Jombang dan Malang
- Sebelah Selatan : Blitar dan Tulungagung

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.

- ❖ Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Kondisi ini tentunya menimbulkan masalah dalam penyelenggara komunikasi dan informatika apabila sarana yang digunakan menggunakan kurang adanya akses dan mengorganisasikan data, informasi dan komunikasi dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman dengan harapan sinyal dapat menembus dataran tinggi dan landai. Dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang tidak bisa menerima sinyal (blank spot).

Adapun isu-isu yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri terletak pada kendala dalam penerapan transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik yaitu:

1. Kondisi topografi alam wilayah Kabupaten Kediri terdapat Pegunungan dan Lembah sehingga akses internet belum diterima dengan baik.
2. Adanya kekurangan jumlah ASN SDM TIK sebagai pengelola SPBE Kabupaten Kediri.
3. Perkembangan TI yang sangat pesat sehingga perlu meningkatkan literasi Digital secara intensif dan massif agar tidak ketinggalan dalam menghadapi Perubahan yang terjadi.
4. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan terkait penataan Jaringan internet di masyarakat karena memang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Dari isu-isu terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaannya, menetapkan beberapa program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024, yang dapat dilihat dari tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepantingan Tahun 2024

Kabupaten Kediri

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			13.281.169.300	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	5.472.020.300	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	

2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	5.011.819.300	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.849.319.300	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.033.500.000	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD	129.000.000	

2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran	-	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	108.000.000	

2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	102.000.000	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	6.000.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	156.904.300	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan yang disediakan	-	

2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	73.480.100	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3.000.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16.734.500	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.331.700	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.358.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	

2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	137.296.700	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.296.700	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	130.000.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.000.000	

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	58.000.000	
2.16.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Mebel yang dipelihara	-	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi	-	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi	-	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Cakupan Layanan informasi dan komunikasi publik	3.456.843.000	

2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah kab/kota	3.456.843.000	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	44.496.500	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	320.000.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	65.500.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	15.400.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Layanan Hubungan Media	2.961.446.500	

2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.000.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkta Kapasitasnya	-	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	-	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Nilai Indeks SPBE penilaian dari Kemenpan RB	4.352.306.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Layanan SPBE yang terkelola	4.352.306.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	-	

2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	-	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4.123.000.000	
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	229.306.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			179.141.600	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah	179.141.600	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di	179.141.600	

			lingkup daerah		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	143.651.900	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5.539.800	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	-	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Infrastruktur Statistik	29.949.900	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			725.000.000	

2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Cakupan keamanan persandian dan TI	725.000.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	725.000.000	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	-	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	725.000.000	

			Non Elektronik		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	
Jumlah				14.185.310.900	

Tabel : 2.4

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perkembangan digitalisasi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mempunyai tujuan agar digitalisasi pemerintahan yang meliputi sistem dan data pemerintah pusat dan daerah lebih terarah dan terencana. Peraturan tersebut didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah upaya pemerintah pusat untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pusat dan daerah. Kedua peraturan adalah dasar transformasi digital yang dilaksanakan pada RPJMN 2020-2024 pada sektor-sektor strategis nasional, hal tersebut dapat meningkatkan pemanfaatana sektor-sektor strategis, yang mendorong pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan pencipataan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sector ekonomi.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Untuk mengkonsentrasikan pada transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024 yang menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;

3. Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); dan
4. Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce).

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
b. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
c. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

a. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
b. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;

c. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
d. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

a) Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
b) Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
c) Meningkatnya konektivitas layanan pos;
d) Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
e) Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
f) Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
g) Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
h) Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
i) Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
j) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis pembangunan kebijakan nasional Kemenkominfo, di turunkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan layanan publik yang berbasis e-Government melalui penataan kelembagaan, pembangunan infrastruktur dan sistem aplikasi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID

Pembantu yang lebih aktif dan professional untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Peningkatan kualitas pelayanan informasi desa melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
d. Peningkatan publikasi dan diseminasi informasi baik melalui media pemerintah, media massa, maupun media sosial.
e. Pemberdayaan informasi masyarakat melalui publikasi isu-isu strategis dalam kegiatan Bakoinmas, pertunjukan rakyat, atau festival.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
c. Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

g. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1.2.1 Tujuan

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaran bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mengemban Visi Bupati Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani", sebagai penjelasannya:

Maju

Suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Kediri dengan semakin meningkatnya daya saing daerah yang diiringi dengan kemajuan pembangunan kawasan, sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan, layanan publik, serta dukungan teknologi yang unggul.

Berkarakter Nasional Religius

Merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, gotong-royong, norma agama, social budaya sehingga menempatkan pribadi sebagai manusia yang beradab dalam bingkai Pancasila.

Sejahtera

Merupakan kondisi masyarakat Kediri yang memiliki taraf hidup yang baik dan mampu memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak melalui kegiatan keseharian yang mapan.

Ekonomi Kerakyatan

Merupakan sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada peran masyarakat dengan mempergunakan sumber daya ekonomi local yang tumbuh menjadi satu kesatuan pembangunan ekonomi daerah.

Birokrasi Yang Melayani

Merupakan kondisi birokrasi pemerintahan yang memenuhi sebagian besar reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang baik sekaligus mitra dan pengayom masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan Kediri.

Berdasarkan Visi tersebut terwujud dalam upaya-upaya pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasional-Religius
b. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
c. Pengembangan Ekonomi Karakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
d. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
e. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
f. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal

g. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
h. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
i. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Upaya mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas diseluruh wilayah Indonesia;
b. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
c. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perwujudan visi dan misi Kabupaten Kediri yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sejalan dengan tujuan utama Kemenkominfo , sebagai tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri terimplementasi sebagai berikut: "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, dengan indikator : indeks Reformasi Birokrasi".

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri bidang informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD yaitu "Meningkatkan Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks SPBE".

1.2.2 Sasaran

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo adalah Meningkatnya Indeks Kategori PPID. Dengan target Kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2024 adalah:

1. Tahun 2021 target Renstra Perangkat Daerah 3,88 dengan realisasi capaian 3,12
2. Tahun 2022 target Renstra Perangkat Daerah 4,04 dengan realisasi capaian 2,61
3. Tahun 2023 target Renstra Perangkat Daerah 2,75 dengan proyeksi 2,75
4. Tahun 2024 dengan proyeksi 3

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kediri termasuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, maka langkah-langkah operasional strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dituangkan ke dalam program-program komunikasi dan informasi serta program statistik yang mengikuti ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Program tersebut berisi satu atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2024 yaitu sebanyak 5 program, 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK dengan kegiatan:
   - ❖ Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi Sub Kegiatan:
     1. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
     2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
     3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
     4. Pelayanan Informasi Publik
     5. Layanan Hubungan Media
     6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, dengan kegiatan:
   - ❖ Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:
     1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
     2. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA dengan kegiatan:
   - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan:
     1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
     3. Pelaksanaan Penatauasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
    1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
    2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Meliputi Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

4. PROGRAM PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL dengan kegiatan:
    - ❖ Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi Sub Kegiatan:
        1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3. Pengembangan Infrastrukstur.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI dengan kegiatan:
   - ❖ Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi Sub Kegiatan:
     1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13.281.169.300	DAU			13.281.169.300
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Ds. Doko , Ngasem	100%	5.472.020.300	DAU		100%	5.472.020.300
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ds. Doko , Ngasem	4 dokumen	-			4 dokumen	-
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ds. Doko , Ngasem	3 dokumen	-			3 dokumen	-

2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ds. Doko , Ngasem	1 laporan	-			1 laporan	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Ds. Doko , Ngasem	60 dokumen	5.011.819.300	DAU		60 dokumen	5.011.819.300
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Doko , Ngasem	32 Orang/Bulan	3.849.319.300	DAU		32 Orang/Bulan	3.849.319.300
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ds. Doko , Ngasem	13 dokumen	1.033.500.000	DAU		13 dokumen	1.033.500.000
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Ds. Doko , Ngasem	12 dokumen	129.000.000	DAU		12 dokumen	129.000.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ds. Doko , Ngasem	1 laporan	-			1 laporan	-
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ds. Doko , Ngasem	18 laporan	-			18 laporan	-
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah dokumen pelaporan analisis prognosis realisasi	Ds. Doko , Ngasem	2 dokumen	-			2 dokumen	-

	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	anggaran							
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		14 laporan	108.000.000	DAU		14 laporan	108.000.000
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	Ds. Doko , Ngasem	2 dokumen	102.000.000	DAU		2 dokumen	102.000.000
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	Ds. Doko , Ngasem	12 laporan	6.000.000	DAU		12 laporan	6.000.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Ds. Doko , Ngasem	1 dokumen	-			1 dokumen	-
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ds. Doko , Ngasem	1 dokumen	-			1 dokumen	-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	Ds. Doko , Ngasem	44 dokumen	156.904.300	DAU		44 dokumen	156.904.300
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan yang disediakan	Ds. Doko , Ngasem	4 paket	-			4 paket	-
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Ds. Doko , Ngasem	4 paket	73.480.100	DAU		4 paket	73.480.100
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Ds. Doko , Ngasem	4 paket	3.000.000	DAU		4 paket	3.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Ds. Doko , Ngasem	4 paket	16.734.500	DAU		4 paket	16.734.500

2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Ds. Doko , Ngasem	4 paket	-			4 paket	-
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ds. Doko , Ngasem	12 dokumen	8.331.700	DAU		12 dokumen	8.331.700
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ds. Doko , Ngasem	12 laporan	55.358.000	DAU		12 laporan	55.358.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Ds. Doko , Ngasem	40 unit	-			40 unit	-
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Ds. Doko , Ngasem	21 unit	-			21 unit	-
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ds. Doko , Ngasem	19 unit	-			19 unit	-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Ds. Doko , Ngasem	36 laporan	137.296.700	DAU		36 laporan	137.296.700
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Ds. Doko , Ngasem	12 laporan	-			12 laporan	-
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ds. Doko , Ngasem	12 laporan	7.296.700	DAU		12 laporan	7.296.700
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Ds. Doko , Ngasem	12 laporan	130.000.000	DAU		12 laporan	130.000.000

2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ds. Doko , Ngasem	67 unit	58.000.000	DAU		67 unit	58.000.000
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Ds. Doko , Ngasem	16 unit	58.000.000	DAU		16 unit	58.000.000
2.16.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Ds. Doko , Ngasem	20 unit	-			20 unit	-
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Ds. Doko , Ngasem	25 unit	-			25 unit	-
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi	Ds. Doko , Ngasem	1 unit	-			1 unit	-
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi	Ds. Doko , Ngasem	5 unit	-			5 unit	-
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan informasi dan komunikasi publik	Ds. Doko , Ngasem	100%	3.456.843.000	DAU + Pajak Rokok		100%	3.456.843.000

2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah kab/kota	Ds. Doko , Ngasem	100%	3.456.843.000	DAU + Pajak Rokok		100%	3.456.843.000
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	12 dokumen	-			12 dokumen	-
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko , Ngasem	3 dokumen	44.496.500	DAU		3 dokumen	44.496.500
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	12 dokumen	320.000.000	DAU		12 dokumen	320.000.000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	6 dokumen	65.500.000	DAU		6 dokumen	65.500.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	6 dokumen	15.400.000	DAU		6 dokumen	15.400.000
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Ds. Doko , Ngasem	62 layanan	2.961.446.500	Pajak Rokok		62 layanan	2.961.446.500
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Ds. Doko , Ngasem	5 dokumen	50.000.000	DAU		5 dokumen	50.000.000

2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkta Kapasitasnya	Ds. Doko , Ngasem	2 dokumen	-			2 dokumen	-
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Ds. Doko , Ngasem	5 unit	-			5 unit	-
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE penilaian dari Kemenpan RB	Ds. Doko , Ngasem	4,52	4.352.306.000	DAU		4,52	4.352.306.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan SPBE yang terkelola	Ds. Doko , Ngasem	2 layanan	4.352.306.000	DAU		2 layanan	4.352.306.000
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Ds. Doko , Ngasem	3 unit	-			3 unit	-
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Ds. Doko , Ngasem	1 dokumen	-			1 dokumen	-

2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko , Ngasem	1 dokumen	4.123.000.000	DAU		1 dokumen	4.123.000.000
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	Ds. Doko , Ngasem	2 dokumen	229.306.000	DAU		2 dokumen	229.306.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Ds. Doko , Ngasem		179.141.600	DAU			179.141.600
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah	Ds. Doko , Ngasem	100%	179.141.600	DAU		100%	179.141.600
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah	Ds. Doko , Ngasem	4 kegiatan	179.141.600	DAU		4 kegiatan	179.141.600
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ds. Doko , Ngasem	4 dokumen	143.651.900	DAU		4 dokumen	143.651.900
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Ds. Doko , Ngasem	65 orang	5.539.800	DAU		65 orang	5.539.800

2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	Ds. Doko , Ngasem	41 dokumen	-			41 dokumen	-
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Ds. Doko , Ngasem	2 unit	29.949.900	DAU		2 unit	29.949.900
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				725.000.000	DAU			725.000.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan keamanan persandian dan TI	Ds. Doko , Ngasem	100%	725.000.000	DAU		100%	725.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	Ds. Doko , Ngasem	1 paket	725.000.000	DAU		1 paket	725.000.000
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Ds. Doko , Ngasem	2 dokumen	-			2 dokumen	-
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko , Ngasem	3 laporan	-			3 laporan	-

2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Ds. Doko , Ngasem	6 laporan	725.000.000	DAU		6 laporan	725.000.000
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Ds. Doko , Ngasem	65 perangkat daerah	-			65 perangkat daerah	-
Total					**14.185.310.900**				**14.185.310.900**

Tabel 2.5

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Terkait dengan rencana kerja dan penandaan Perangkat Daerah pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**3.456.843.000**	
1.1	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota***	***3.456.843.000***	
1.1.1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	44.496.500	DAU
1.1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	320.000.000	DAU
1.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	65.500.000	DAU
1.1.4	Pelayanan Informasi Publik	15.400.000	DAU
1.1.5	Layanan Hubungan Media	2.961.446.500	DAU+PAJAK ROKOK
1.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.000.000	DAU
2	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**4.352.306.000**	
2.1	***Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***4.352.306.000***	
2.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4.123.000.000	DAU
2.1.2	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	229.306.000	DAU
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**5.472.020.300**	
3.1	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***5.011.819.300***	
3.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.849.319.300	DAU
3.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.033.500.000	DAU

3.1.3	Pelaksanaan Penatauasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	129.000.000	DAU
3.2	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**108.000.000**	
3.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000	DAU
3.2.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	DAU
3.3	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***156.904.300***	
3.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.480.100	DAU
3.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	DAU
3.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.734.500	DAU
3.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.331.700	DAU
3.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.358.000	DAU
3.4	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***137.296.700***	
3.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.296.700	DAU
3.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000	DAU
3.5	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***58.000.000***	
3.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000	DAU
4	**PROGRAM PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL**	**179.141.600**	
4.1	***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota***	***179.141.600***	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	143.651.900	DAU
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5.539.800	DAU
4.1.3	Pengembangan Infrastrukstur	29.949.900	DAU
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**725.000.000**	

5.1	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***725.000.000***	
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	725.000.000	DAU
	JUMLAH	**14.185.310.900**	

Tabel 2.6

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman pada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah memuat tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berfungsi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam menjalan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri kearah yang lebih baik dimasa datang.

Kediri, - - 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri

SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690223 198903 1 002

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA